

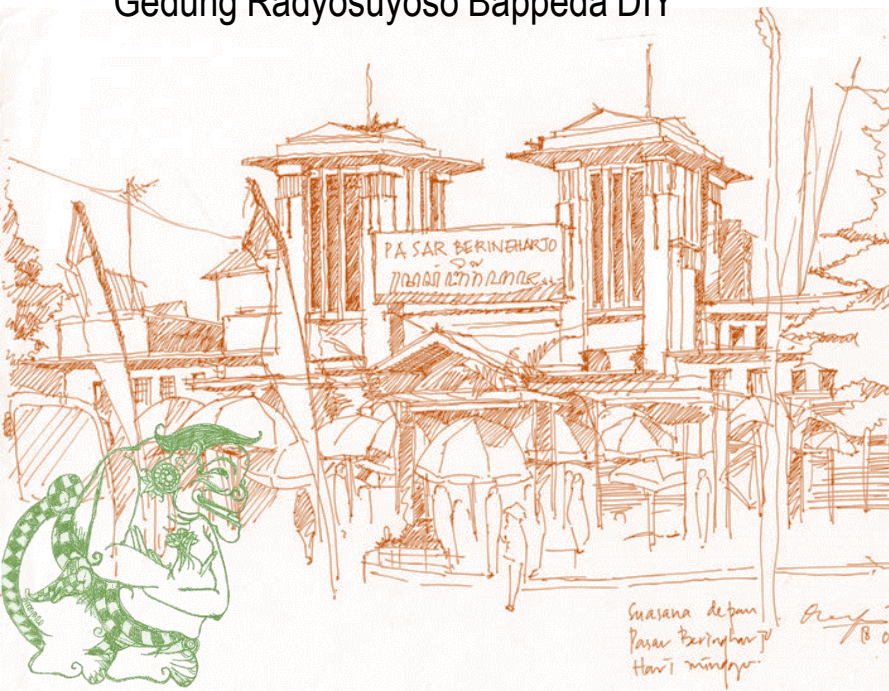


Arah Kebijakan Pembangunan Pemerintahan DIY

Asisten Pemerintahan dan Kesra

Kamis, 10 Maret 2016

Gedung Radyosuyoso Bappeda DIY



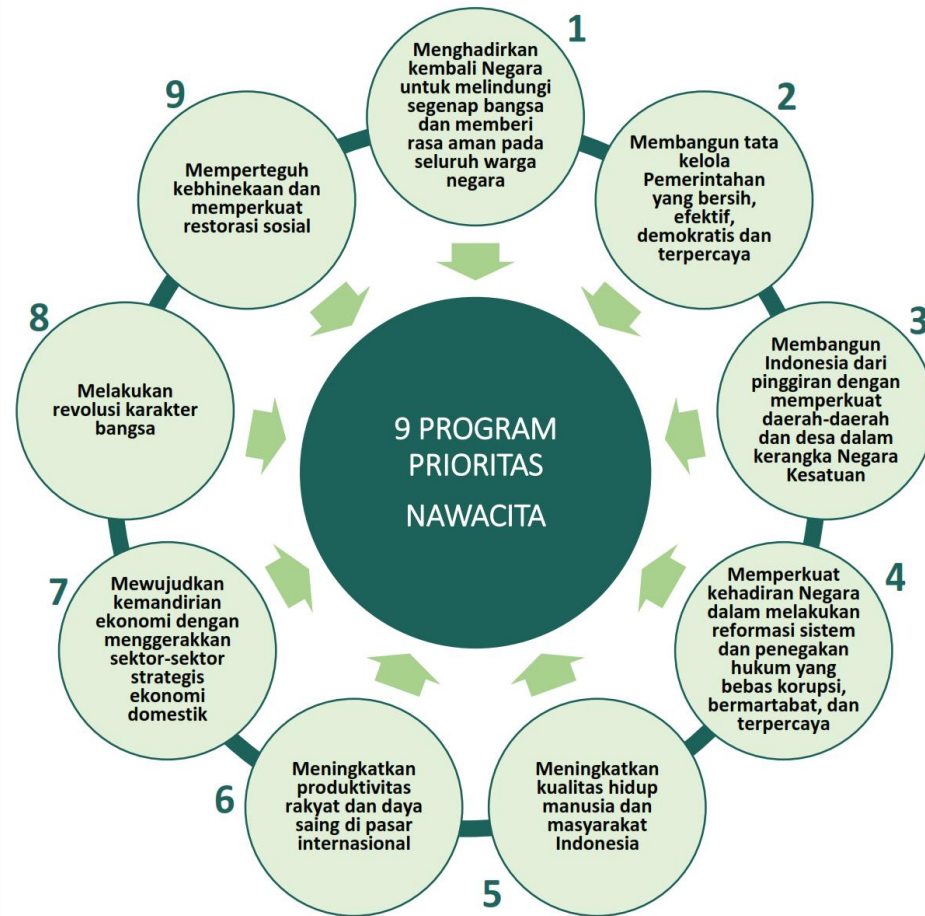


VISI DAN MISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019

VISI PEMBANGUNAN NASIONAL 2015-2019:
"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan
Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"

Visi ini diwujudkan melalui **7 (tujuh) MISI PEMBANGUNAN** yaitu:

1. Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional.
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.





SINERGI TEMA RKP DAN RKPD 2017

**ARAHAN PRESIDEN
TERKAIT PENYUSUNAN RKP 2017
(HASIL SIDANG KABINET 10) FEBRUARI 2016)**

TEMA RKP 2017

**“MEMACU PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI UNTUK
MENINGKATKAN KESEMPATAN
KERJA SERTA MENGURANGI
KEMISKINAN DAN KESENJANGAN
ANTAR WILAYAH”.**

- ✓ Pendekatan pembangunan: holistik, tematik, terintegrasi, dan spasial
- ✓ Anggaran berorientasi manfaat utk rakyat dan berorientasi prioritas pembangunan nasional
- ✓ Kebijakan anggaran belanja tidak berdasarkan *money follow function*, ttp ***money follow program prioritas***. Tidak perlu semua tugas dan fungsi (*tusi*) harus dibiayai secara merata.
- ✓ Memangkas program nomenklturnya tdk jelas & tidak ada manfaatnya bagi rakyat.
- ✓ Perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dan terpadu.

TEMA RKPD 2017

**PEMBANGUNAN YANG
BERKEADILAN DENGAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA,
PERTUMBUHAN EKONOMI,
DAN PERBAIKAN LAYANAN
PUBLIK**

KAB/KOTA

DESA

Rumusan Tema Menurut RPJMD DIY Tahun Ke-5

Mendayagunakan &
mengoptimalkan (SDM
unggul, kesehatan terjamin,
kemiskinan turun,
pengangguran turun,
investasi tumbuh, ekonomi
tumbuh & merata,
infrastruktur mantap,
masyarakat lebih berbudaya
& DIY lebih karakter)

Kebutuhan Perencanaan Pembangunan di Tahun 2017

- Mengurangi Disparitas Wilayah;
- Meningkatkan Sumberdaya Manusia Berkualitas;
- Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
- Meningkatkan Kesempatan Kerja;
- Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi;
- Meningkatkan Kualitas Layanan Publik.



Visi-Misi dan Tema Pembangunan 5 Tahunan

NAWACITA : GATRA 2



Misi Pembangunan DIY
5 (Lima) Tahun 2012-2017 :

1. Membangun peradaban yang berbasis nilai-nilai kemanusiaan;
2. Memperkuat perekonomian daerah yang didukung dengan semangat kerakyatan, inovatif dan kreatif;
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik;
4. Memantapkan prasarana dan sarana daerah.

VISI KDH :

"Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru"

ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2017

Reformasi Birokrasi Pemerintahan

1. Layanan publik prima (cepat, mudah, ringkas, transparan, dan Birokrasi yang responsif)
2. Program Pembangunan dan belanja pemerintah didasarkan azas manfaat, bermutu, efisien dan efektif
3. Penerapan disiplin, *reward & punishment* dan sistem merit dalam birokrasi

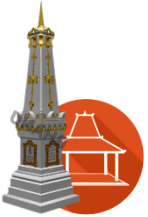


MISI III : TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK

MISI III : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
Mewujudkan pengelolaan pemerintahan secara efisien dan efektif.	1.Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat.	Meningkatkan efektivitas kinerja birokrasi dan layanan publik yang responsif, transparan, dan akuntabel.	Meningkatkan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari B menjadi A.
	2.Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat.	Meningkatkan profesionalisme pengelolaan keuangan daerah, optimalisasi pemanfaatan aset daerah, perbaikan dan peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pendapatan daerah.	Mempertahankan Opini pemeriksaan BPK yaitu Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)



Sasaran : Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah meningkat				2015	2016	2017	
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Nilai (Kementerian PAN)	n/a	n/a	A	A	A	Sesudah Perubahan
Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	Nilai (Kementerian PAN)	B	B	n/a	n/a	n/a	Sebelum Perubahan
Sasaran : Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat							
Opini pemeriksaan BPK.	Opini Pemeriksaan BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Tetap



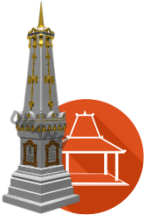
Tema dan Sasaran Pembangunan DIY (RKPD) Tahun 2017

Tema Pembangunan DIY Tahun 2017 :

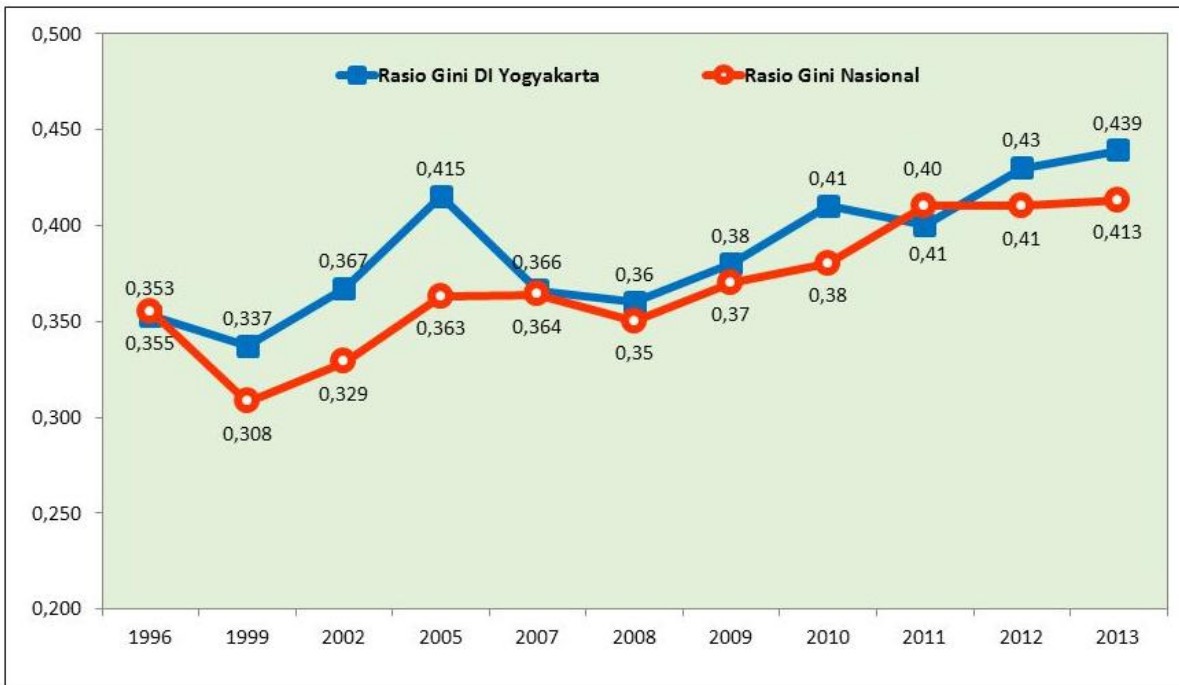
**PEMBANGUNAN YANG BERKEADILAN DENGAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA, PERTUMBUHAN EKONOMI, DAN PERBAIKAN LAYANAN PUBLIK**



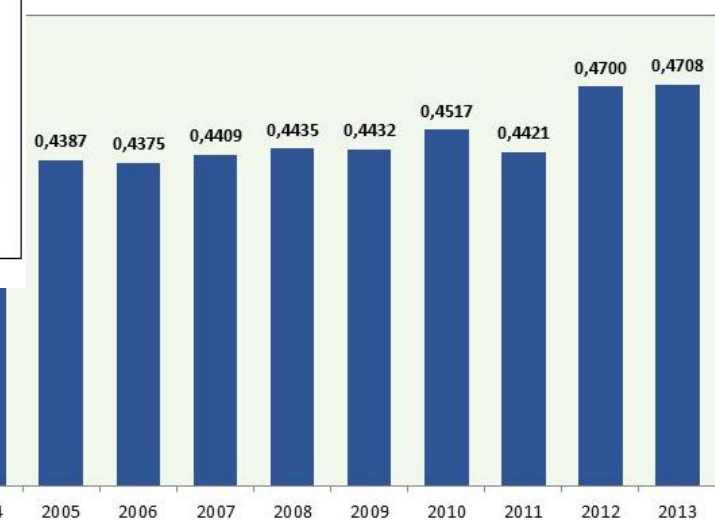
No	Indikator Sasaran	2013	2014	2015	2016	2017
1.	Derajat partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pelestarian Budaya.	63,46 %	65,40 %	67,28 %	68,58 %	70 %
2.	Angka Melek huruf.	91,99	92,6	93,25	94,65	95
3.	Rata-rata lama sekolah.	9,6	10	10,8	11,6	12
4.	Persentase satuan pendidikan yang menerapkan model pendidikan berbasis budaya.	0%	5%	10%	20%	40%
5.	Angka Harapan Hidup.	73,37	73,67	73,81	73,96	74,18
6.	Pendapatan perkapita pertahun (ADHK).	7,0 jt	7,4 jt	7,8 jt	8,2 jt	8,5 jt
7.	Indek Ketimpangan Antar Wilayah.	0,4530	0,4515	0,4465	0,4455	0,4445
8.	Indeks Ketimpangan Pendapatan.	0,2980	0,2950	0,2898	0,2888	0,2878
9.	Jumlah wisatawan nusantara.	2.602.074	2.754.981	2.877.493	2.955.679	3.001.377
	Jumlah wisatawan mancanegara.	235.888	249.854	261.053	272.053	272.162
10.	Lama tinggal wisatawan mancanegara	2,15 hari	2,25 hari	2,35 hari	2,45 hari	2,69 hari
	Lama tinggal wisatawan nusantara	2,00 hari	2,15 hari	2,30 hari	2,45 hari	2,60 hari
11.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.	B	A	A	A	A
12.	Opini pemeriksaan BPK.	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
13.	Load factor angkutan perkotaan meningkat.	34,57%	36,57%	38,57%	40,57%	42,57%
14.	Persentase Peningkatan Kualitas Lingkungan.	3,14%	6,29%	9,43%	12,58%	15,72%
15.	Kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap RTRW Kab/Kota dan RTRW Provinsi meningkat.	50%	60%	64,25%	64,50%	64,75%



Ketimpangan Pendapatan dan Ketimpangan Regional



Ketimpangan antar wilayah di DIY ditunjukkan oleh Indeks Williamson, semakin tinggi angkanya, menunjukkan ketimpangan antar wilayah yang juga semakin lebar. Pada tahun 2014 turun menjadi 0,456. Penurunan ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan wilayah antar kabupaten/kota di DIY semakin berkurang karena ketersediaan sarana prasarana dasar pada wilayah tertinggal semakin meningkat, sehingga mendukung perbaikan akses masyarakat terhadap pertumbuhan perekonomian wilayah.



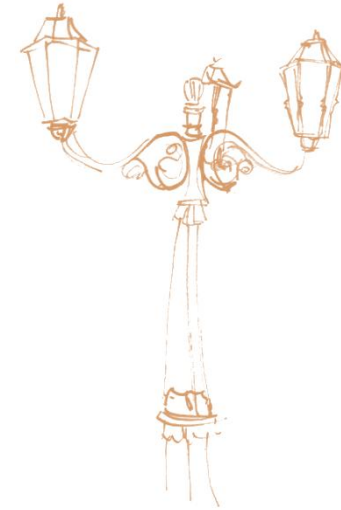
Sumber: BPS DIY

Sumber: BPS, 2015

Besarnya Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Semakin mendekati 0, artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1, artinya distribusi pendapatan semakin tidak merata. Pada Tahun 2014, rasio gini DIY menurun, yakni 0,42.

Kesenjangan antar wilayah semakin meningkat yang ditunjukkan dari Indeks Williamson yang meningkat dari tahun ke tahun

SASARAN RPJMN WILAYAH PULAU JAWA PER PROVINSI TAHUN 2015-2019



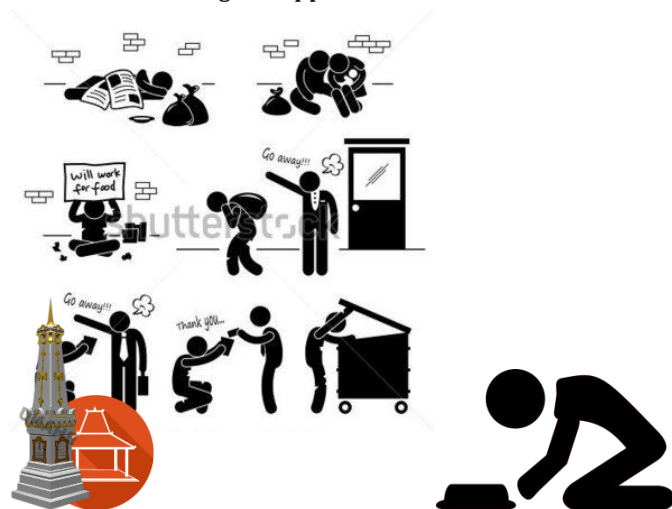
Wilayah	Pertumbuhan Ekonomi (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	5.4	6.5	7.2	7.3	7.9
Jawa Barat	5.5	6.6	7.1	7.8	7.7
Banten	4.9	5.6	6.4	6.8	7.7
Jawa Tengah	5.7	6.7	7.1	7.5	7.7
D.I Yogyakarta	5.3	5.9	6.1	6.4	6.5
Jawa Timur	6.2	6.6	7.1	7.3	7.9
Bali	7.5	7.3	7.8	8.3	8.6

Wilayah	Tingkat Kemiskinan (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	3.4	3.2	3.0	2.7	2.5
Jawa Barat	8.9	8.2	7.6	6.9	6.3
Banten	5.3	4.9	4.5	4.1	3.7
Jawa Tengah	13.1	12.2	11.3	10.4	9.5
D.I Yogyakarta	13.8	12.8	11.8	10.9	9.9
Jawa Timur	12.0	11.2	10.4	9.6	8.7
Bali	4.0	3.7	3.5	3.2	2.9

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014

Wilayah	Tingkat Pengangguran (Persen)				
	2015	2016	2017	2018	2019
DKI Jakarta	9.3	9.1	8.8	8.5	8.3
Jawa Barat	8.6	8.3	8.0	7.7	7.4
Banten	9.6	9.2	8.8	8.4	8.0
Jawa Tengah	5.4	5.2	5.1	4.9	4.7
D.I Yogyakarta	3.0	2.8	2.6	2.5	2.3
Jawa Timur	4.0	3.9	3.7	3.6	3.5
Bali	1.9	1.8	1.8	1.7	1.6

Sumber: Perhitungan Bappenas, 2014





Jumlah Penduduk Miskin dan Garis Kemiskinan

Periode Survei	Garis Kemiskinan (Rp./Kapita/Bln)	Penduduk Miskin (ribu orang)	Persentase Penduduk Miskin (%)
Maret 2010	234.282	577,30	16,83
Sept 2011	257.909	564,23	16,08
Maret 2012	260.173	565,32	16,05
Sept 2012	270.110	562,11	15,88
Maret 2013	283.454	550,19	15,43
Sept 2013	303.843	535,18	15,03
Maret 2014	313.452	544,87	15,00
Sept 2014	321.056	532,59	14,55
Maret 2015	335.886	550,23	14,91
Sept 2015	347.721	485,56	13,16

Sumber : Susenas Maret 2010-September 2015



Sumber: BPS, 2015

Tingkat kemiskinan D.I Yogyakarta dari 2004 s.d 2014 selalu berada di atas tingkat kemiskinan Nasional

PENDUDUK MISKIN DIY

Persentase Penduduk Miskin di Daerah Istimewa Yogyakarta Maret 2010 – September 2015





Arah Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

Lets get it
Right

Penyuluhan penduduk miskin akan hak dasar dan aksesibilitas pelayanan dasar



Peningkatan sinkronisasi dan efektivitas perluasan pelayanan dasar untuk penduduk miskin dan rentan



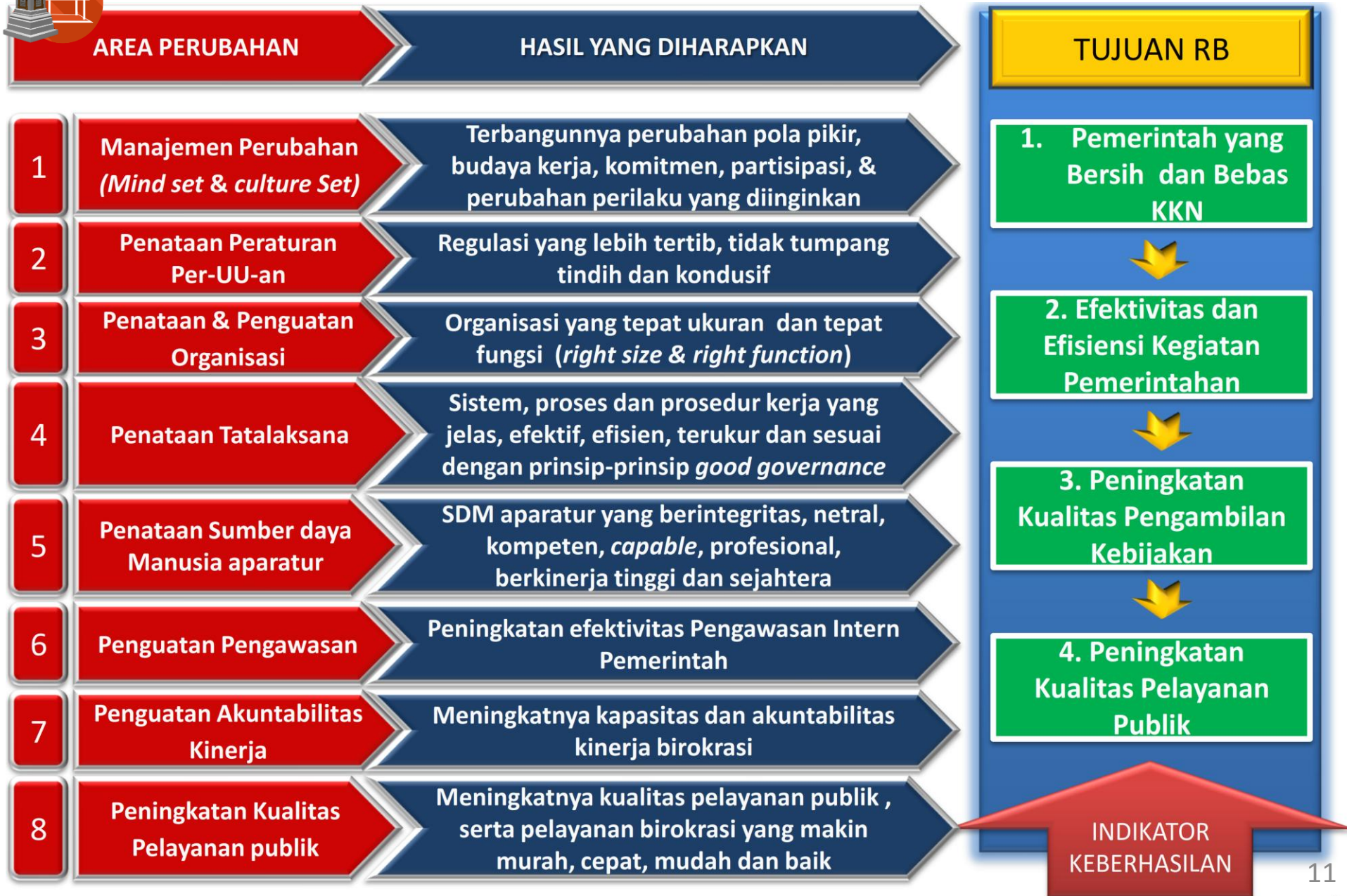
Penguatan respon pemerintah dan penyedia layanan, serta partisipasi inklusif masyarakat dalam pemenuhan pelayanan dasar



Penguatan sasaran dan keterpaduan data; pemanfaatan data kependudukan (by name, by address dan by Nomor Induk Kependudukan)



AREA PERUBAHAN, HASIL YANG DIHARAPKAN, DAN TUJUAN REFORMASI BIROKRASI





8 Area Perubahan Terhadap Tujuan Reformasi Birokrasi

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

**Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik**

- Manajemen Perubahan (*Mind & culture set*)
 - Penguatan Pengawasan
 - Penguatan Akutabilitas Kinerja

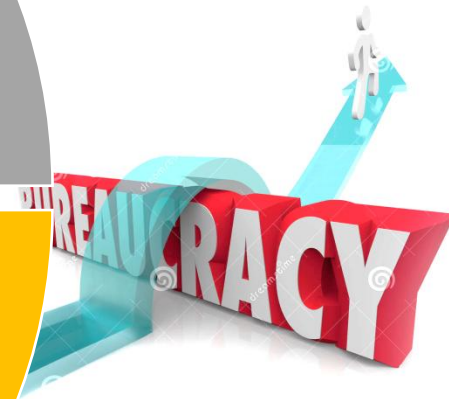
**Pemerintahan
yang Bersih
dan Bebas
KKN**

**Peningkatan
Kualitas
Pengambilan
Kebijakan**

- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Penataan Tatalaksana

**Efektifitas dan
Efisiensi
Kegiatan
Pemerintahan**

- Penataan & Penguatan Organisasi
- Penataan SDM Aparatur

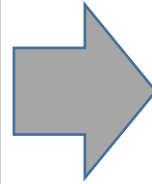




ARAH KEBIJAKAN IMPLEMENTASI 8 AREA PERUBAHAN (1-2)

Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN

- Manajemen Perubahan (*Mind & culture set*)
- Penguatan Pengawasan
- Penguatan Akutabilitas Kinerja



- ✓ Penguatan implementasi budaya Satriya
- ✓ Penerapan pengawasan yang profesional, berintegritas, independen, dan sinergis
- ✓ Pemantapan penerapan sistem pengendalian intern Pemerintah untuk mendukung efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
- ✓ Penguatan akuntabilitas keuangan dan kinerja

Efektifitas dan Efisiensi Kegiatan Pemerintahan

- Penataan & Penguatan Organisasi
- Penataan SDM Aparatur



- ✓ Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis
- ✓ Penguatan sinergitas antar lembaga (*well interconnected governance system*).
- ✓ Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis *merit* untuk mewujudkan ASN yang kompeten, berintegritas, dan berkinerja,



ARAH KEBIJAKAN IMPLEMENTASI 8 AREA PERUBAHAN (2-2)

- ✓ Penguatan kelembagaan dan tatakelola pelayanan publik
- ✓ Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik

- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

**Peningkatan
Kualitas
Pelayanan
Publik**

- ✓ Peningkatan kapasitas dalam perumusan dan pengelolaan kebijakan publik
- ✓ Mewujudkan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis *e-government*
- ✓ Pelayanan Hukum yang update, valid, responsif, dan aksesibel

- Penataan Peraturan Perundang-undangan
- Penataan Tatalaksana

**Peningkatan
Kualitas
Pengambilan
Kebijakan**

MUATAN LAIN

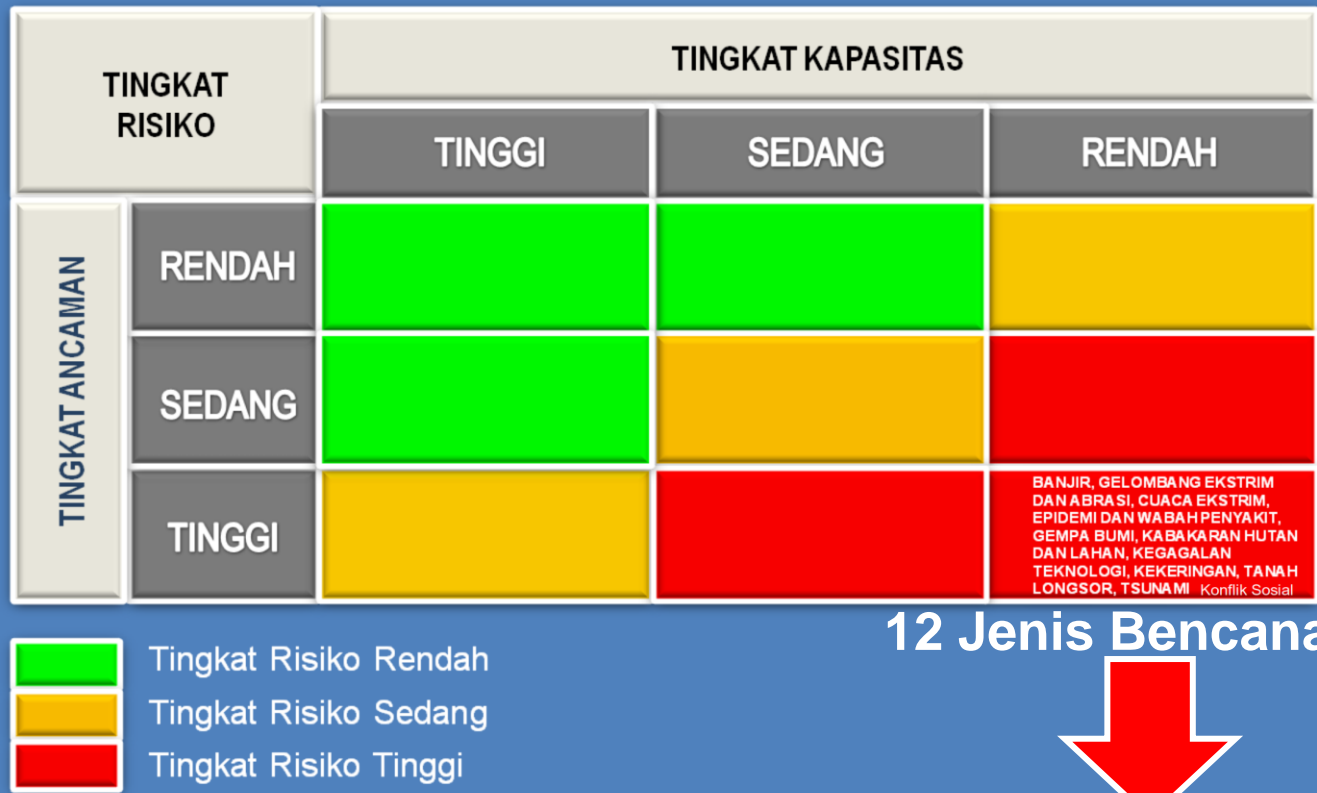
- ❖ Regulasi penanggulangan bencana masih belum optimal.
- ❖ Kurangnya integrasi program dan belum prioritasnya pengurangan resiko bencana
- ❖ Sarana dan prasarana penanggulangan bencana yang masih kurang



Arah Kebijakan :
Integrasi program pembangunan untuk pengurangan resiko bencana



Matriks Penentuan Tingkat Risiko Multi Bencana di Daerah Istimewa Yogyakarta



12 Jenis Bencana



Gelombang Ekstrim & Abrasi, Cuaca Ekstrim, Banjir, Epidemi dan Wabah Penyakit, Gempa Bumi, Gunung Api, Kebakaran, Gagal Teknologi, Kekeringan, Tanah Longsor, Tsunami, Konflik Sosial.

ഭാരതീയ നഗര ജീവിതം

